Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang RI NO.23 Tahun 2004 (Studi Kasus Polres Seluma)

Egi Amanda^{a1}, Rangga Jayanuarto^{b2}, Hendri Padmi^{c3}, JT. Pareke^{d4}

^{a1}Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2,c3,d,4}Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

A B S T R A K

Kata Kunci:

Penegakan Hukum,
Tindak Pidana,
Kekerasan Dalam
Rumah Tangga,

Ilmu hukum pada umumnya dan praktiknya seringkali menimbulkan masalah yang menyangkut keberadaan kaidah hukum, dan efektivitas kaidah- kaidah hukum dengan mengetengahkan efektivitas hukum yang ingin dicapai. Alasan inilah yang mendorong peneliti untuk menyusun tugas akhir dengan judul :“ Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam ruang lingkup Polres Seluma.”Rumusan Masalah adalah: 1)Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam ruang lingkup Polres Seluma? 2) Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam ruang lingkup Polres Seluma? Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil studi lapangan dengan melakukan wawancara sumber, yaitu kepada Penyidik yaitu Sugeng di Resor Seluma. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat diketahui bahwa penegakan hukum dalam kekerasan dalam rumah tangga sudah diterapkan dengan baik oleh Sat Resor Seluma dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Alasan pelapor mencabut laporan adalah hanya ingin memberikan rasa jera dan karena kasihan dengan suami yang sedang diproses hukum, alasan pelapor mencabut laporan adalah perempuan, merupakan sosok yang selalu rentan mengalami kekerasan itu masih beranggapan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialaminya adalah urusan pribadi rumah tangga mereka dan bukan untuk menjadi konsumsi publik. Yang terjadi adalah terdapat beberapa kasus yang laporannya dicabut oleh pihak pelapor, ini membuktikan bahwa undang-undang ini sekadar muncul dan tidak dilanjutkan oleh pihak yang berwajib untuk proses hukum.

Keywords:

*Law Enforcement,
Crime, Domestic
Violence,*

A B S T R A C T

Legal science, in general, and its practice often lead to issues concerning the existence of legal norms and the effectiveness of these norms in achieving the intended legal outcomes. This reason motivated the researcher to compose a final project entitled: "Law Enforcement of Domestic Violence Crimes within the Scope of Seluma resort police." The research questions are: 1) How is the enforcement of domestic violence crimes within the scope of Seluma resort police? 2) What are the obstacles in enforcing domestic violence crimes within the scope of Seluma resort police? The approach used in this research is empirical juridical research of a descriptive nature. Primary data were obtained directly from field studies by conducting interviews with sources, specifically Investigator Sugeng at Seluma resort police. Based on the results of the research and discussions on the issues addressed, the conclusions can be drawn as follows: Based on the interviews, it was found that the enforcement of domestic violence laws has been effectively implemented by the Seluma resort police based on Law No. 23 of 2004. However, the active role of the community in all activities aimed directly or indirectly at enforcing domestic violence laws is urgently needed to be both socialized and realized. The reason for the reporter withdrawing their report was to give a deterrent effect and out of pity for the husband who was being processed legally. The fact that the reporter is a woman, who is always vulnerable to violence, still believes that domestic violence is a private household matter and not for public consumption. It has been found that several cases were withdrawn by the reporters, proving that this law merely emerges and is not followed up by the authorities for legal processing.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan. Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Berbagai pendapat, persepsi, dan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Berbagai kasus berakibat fatal dari kekerasan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap rumah tangga, terkuak dalam surat kabar dan media massa.¹

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri atau keluarga. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja termasuk, suami, istri, dan anak. Dalam skripsi ini hanya akan membahas secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dipersempit mengenai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah istri. Bila kita lihat lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup oleh badai pertengkaran dan percekocokan. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya.²

Dalam Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Pada umumnya masalah kekerasan dalam rumah tangga sangat erat kaitannya dengan ketiadaan akses perempuan kepada sumber daya ekonomi (financial modal dan benda-benda tidak bergerak seperti tanah, dan sumber-sumber kesejahteraan lain), usia, pendidikan, agama dan suku bangsa. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami perempuan juga berlapis-lapis artinya bentuk kekerasan yang dialami perempuan bisa lebih dari satu bentuk kekerasan baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹ Alimuddin, 2014. *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung, halaman. 38

² Undang-undang RI No.23 Th. 2004, tentang Undang-undang PKDRT

adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Di sisi lain pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam penerapan sanksi pidana masih sering terjadi dualisme di dalam penerapan ketentuan pemidanaan.³

Kekerasan terhadap perempuan menurut perserikatan bangsa-bangsa dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestik. Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara psikis. Hal penting lainnya ialah bahwa suatu kejadian yang bersifat kebetulan (*eccidental*) tidak dikategorikan sebagai kekerasan walaupun menimbulkan kerugian pada perempuan.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan gambaran gagalnya sebuah keluarga dalam membangun rumah tangga yang harmonis, kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang dalam hukum atau undang-undang dilarang. Menurut Mufidah, Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang kepada seseorang atau sejumlah orang, yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan.⁴

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, memberikan penjelasan apa yang dimaksudkan tindak kekerasan dalam rumah tangga, yakni setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵

Berdasarkan defenisi tersebut di atas terlihat untuk siapa undangundang ini diberlakukan tidaklah semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi untuk semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi dalam kenyataannya bukan hanya perempuan, baik yang dewasa maupun anak-anak, melainkan juga laki-laki baik dewasa maupun anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana

³ Herkutowanto, 2018. *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana*, dalam buku *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung, PT.Alumni, halaman 25

⁴ Mufidah, 2018. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Malang Press, Malang, halaman 267

⁵ Rika Saraswati, 2016. *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 19

kekerasan yang banyak terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah fenomena yang hingga saat ini merupakan kekejaman yang amat sulit untuk dipantau hal ini disebabkan karena masih adanya pandangan yang keliru dari sebagian masyarakat bahwa masalah kekerasan dalam rumah-rumah tangga (KDRT) adalah masalah interen keluarga dan sangat pribadi sifatnya sehingga orang luar tidak berhak untuk mencampurinya. Dampak yang ditimbulkan akibat KDRT seperti trauma psikologis berupa depresi, stress, memiliki *Trust Issues* (Krisis kepercayaan), ketidak stabilan emosi.

Unsur-unsur dari tindak pidana KDRT dapat dilihat berdasarkan pengertian dari KDRT itu sendiri. Maka berdasarkan pengertian KDRT yang terdapat di dalam Pasal 1 butir 1 UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, Unsur-unsur tindak pidana KDRT adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam lingkup rumah tangga.
- 2) Menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan di dalam lingkup rumah tangga.⁶

Berdasarkan unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga tersebut, maka bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT tercantum dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, yakni :

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga juga dapat dikategorikan dalam pengertian kekerasan, karena Setiap orang dilarang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁷

1.2 Metode Penelitian

⁶ Dwi Ika Putri, 2019. *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Rumah Tangga*, Makasar, Sinar Grafika, Hal. 33

⁷ Moerti Hadiati Soeroso, 2016. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Surabaya, Sinar Grafika, , Hal. 83

Jenis penelitian dalam penelitian ini, termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris. Dengan kata lain yaitu jenis penelitian yuridis empiris yang dapat di sebut juga dengan penelitian lapangan.⁸

1.3 Hasil Penelitian

Penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam ruang lingkup Polres Seluma

Berdasarkan fakta dan analisa kasus dapat petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023,sekitar jam 16.00 Wib yang dilakukan oleh Tersangka sdr. Samsul Bahri Alias Balok Bin Ka'is (Alm) terhadap korban sdri. Yesi Anggraini Binti Cik Aman yang juga merupakan istri sahnya yang dinikahi tahun 2023 dan sampai saat ini belum bercerai. Kepada Tersangka dapat disangkakan melanggar Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (2) Sub Pasal 5 Huruf a Jo Pasal 44 Ayat 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Unsur dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (2) UU 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dilarang Melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain.
3. Dalam lingkup rumah tangganya.
4. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.

Pembahasan unsur-unsur Tindak Pidana tersebut diperkuat dengan fakta-fakta yang berhasil diperoleh sebagai berikut :

- a) Unsur "Setiap orang" adalah manusia atau orang yang merupakan subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara ini menunjuk tersangka an. Samsul Bahri Alias Balok Bin Ka'is (Alm) telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka dan barang bukti.
- b) Unsur "Dilarang melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain" telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, Visum Et Repertum (surat), dan keterangan tersangka sebagai berikut:

- 1) Saksi korban dan saksi-saksi:

Yesi Anggraini Binti Cik Aman

Yuda Pranata Saputra Bin Hengki Saputra

Silvia Febriyanti Binti Yosep Ardiansyah (Alm)

Ade Fitri Laini Binti Bihan (Alm)

Eni Yunita Binti Bihan (Alm).

Saksi Korban menyatakan Pada Hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib korban di pukul di bagian kepala sebanyak tiga kali, kemudian korban terjatuh di teras depan rumah, kemudian saya di banting kelantai sambil rambut saya ditarik oleh suami saya, kemudian saya kembali ditampar, kemudian saya bangun untuk mencari anak saya

⁸ Made Pasek Diantha. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman. 132

ke dalam kamar, suami saya membanting saya kembali saya terjatuh dengan posisi terlungkup kemudian suami saya memijak-mijak seluruh badan saya dan kepala saya di benturkan di lantai “ dan untuk kejadian selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 08.30 wib suami saya menganiaya saya dengan cara “suami saya menarik selimut, kemudian tangan saya ditarik/saya diseret untuk sampai ketempat mengambil uang, kemudian bagian belakang badan saya di tendang berulang kali.

Saksi-saksi menyatakan mengetahui perihal korban tidak bisa berdiri dan hanya bisa berbaring (mengalami cedera) diakibatkan setelah cekcok dalam rumah tangga dengan pelaku yang bernama Samsul Bahri Alias Balok Bin Ka’is (Alm) setelah melihat keadaan korban dan diberitahu langsung oleh korban perihal penyebab korban tidak bisa berdiri dan hanya bisa berbaring saja adalah akibat dipukuli oleh pelaku yang merupakan suami sah korban.

Berdasarkan pemeriksaan di TKP, keterangan saksi – saksi, Hasil Visum Et Repertum ,petunjuk dan pemeriksaan tersangka serta pembahasan di atas baik analisa kasus maupun analisa yuridis serta dikuatkan dengan barang bukti,maka Penyidik/ Penyidik Pembantu dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terhadap Tersangka sdr Samsul Bahri Alias Balok Bin Ka’is (Alm) dapat disangkakan melanggar Pasal 5 Huruf a Jo Pasal 44 Ayat (2) Sub Pasal 5 Huruf a Jo Pasal 44 Ayat (1) UU RI No 23 Th 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Hal-hal yang memberatkan Tersangka :
 - a. Tersangka sebagai seorang suami seharusnya menjadi Pembina rumah tangga, pengayom, pelindung dan panutan bagi korban dan anak-anaknya yang masih kecil yang dikhawatirkan akan mengalami trauma atas kejadian tersebut.
 - b. Tersangka sudah sering melakukan kekerasan fisik terhadap korban, akab tetapi sebelumnya hanya diselesaikan secara kekeluargaan saja.
 - c. Tersangka melakukan kekerasan di depan anak-anaknya, sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada psikis anak-anaknya.
 - d. Akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tersangka, korban mengalami luka berat dan lumpuh sehingga korban hanya bisa berbaring saja di tempat tidur dan tidak bisa beraktifitas seperti biasanya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat diketahi bahwa penegakan hukum dalam kekerasan dalam rumah tangga sudah diterapkan dengan baik oleh Sat Resor Seluma dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 hal ini tertuang dalam aturan yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi : “Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.”

Akan tetapi peran masyarakat juga dibutuhkan baik secara aktif dalam setiap kegiatan yang langsung ataupun tidak langsung bertujuan

untuk menegakkan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga teramat mendesak untuk disosialisasikan sekaligus direalisasikan. Ketersediaan sarana dan prasarana hukum yang memadai menjadi sesuatu yang urgen dan vital keberadaan dan fungsinya. Salah satunya adalah tersedianya peraturan yang berfungsi secara efektif dalam menangani masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan rumah tangga dalam ruang lingkup Polres Seluma

Proses penyidikan terhadap kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No 23 tahun 2004 yang dilaksanakan dengan prinsip Penegakan Hukum secara Terpadu, yaitu pemeriksaan tersangka dan sekaligus pemberian hak-hak korban KDRT yang dilaksanakan oleh pihak Polri bekerjasama dengan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit, Pemerintah dan Lembaga Sosial Masyarakat . Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya. Sesuai dengan Pasal 10, UU PKDRT, maka korban KDRT memiliki hak sebagai korban, diantaranya:

- 1) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- 2) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- 3) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- 4) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) pelayanan bimbingan Rohani.⁹

Dilihat dari sisi Undang-Undang memang telah diatur mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini telah dianggap seluruh masyarakat Indonesia mengetahui dan wajib mematuhi. Akan tetapi, masih ditemukannya dilapangan bahwa masyarakat tidak mengetahui bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dilarang oleh Undang-Undang dan akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat memaparkan bahwa hambatan penegakan hukum dalam kekerasan dalam rumah tangga bahwa hampir semua kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masuk yaitu masih dengan keterangan proses atau dicabut. Alasan pelapor mencabut laporan adalah hanya ingin memberikan rasa jera dan karena kasihan dengan suami yang sedang diproses hukum, alasan pelapor

⁹ Hamsi, S. P., Kamal, M., & Poernomi, S. L. (2024). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), 580-597.

mencabut laporan karena yang dialaminya adalah urusan pribadi rumah tangga mereka dan bukan untuk menjadi perbincangan ataupun merasa malu jika diketahui oleh orang. Maka dari itu banyak kasus yang laporannya dicabut oleh pihak pelapor, hal ini membuktikan bahwa undang-undang ini muncul hanya sekedar muncul dan tidak dipergunakan oleh pihak yang berwajib untuk melanjutkan proses hukum, sehingga kegunaan dari undang-undang ini tidak terlihat. Dengan adanya undang-undang ini maka tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini dapat ditangani dan memproses pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesuai hukum yang berlaku, karena pada dasarnya hukum pidana terdiri dari beberapa peraturan dan perintah yang diancam dengan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Padahal dengan ngikuti peraturan yang berlaku akan membantu mengurangi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

KESIMPULAN.

1. Penegakan hukum dalam kekerasan dalam rumah tangga sudah diterapkan dengan baik oleh Sat Resor Seluma dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Akan tetapi peran masyarakat juga dibutuhkan baik secara aktif dalam setiap kegiatan yang langsung ataupun tidak langsung bertujuan untuk menegakkan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga teramat mendesak untuk disosialisasikan sekaligus direalisasikan. Ketersediaan sarana dan prasarana hukum yang memadai menjadi sesuatu yang urgen dan vital keberadaan dan fungsinya. Salah satunya adalah tersedianya peraturan yang berfungsi secara efektif dalam menangani masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Hampir semua kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masuk adalah masih dengan keterangan proses atau dicabut, hampir semua kasus ber status demikian. Alasan pelapor mencabut laporan adalah hanya ingin memberikan rasa jera dan karena kasihan dengan suami yang sedang diproses hukum, alasan pelapor mencabut laporan adalah perempuan, merupakan sosok yang selalu rentan mengalami kekerasan itu masih beranggapan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialaminya adalah urusan pribadi rumah tangga mereka dan bukan untuk menjadi konsumsi publik. Yang terjadi adalah terdapat beberapa kasus yang laporannya dicabut oleh pihak pelapor, ini membuktikan bahwa undang-undang ini sekedar muncul dan tidak dilanjutkan oleh pihak yang berwajib untuk proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, 2014. *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung.
- Dwi Ika Putri, 2019. *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Rumah Tangga*, Makasar, Sinar Grafika.
- Hamsi, S. P., Kamal, M., & Poernomi, S. L. (2024). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), 580-597.
- Herkutanto, 2018. *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana, dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung , PT.Alumni.
- Made Pasek Diantha. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mufidah, 2018. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* , UIN Malang Press , Malang.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2016. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Surabaya, Sinar Grafika.
- Rika Saraswati, 2016. *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga* , PT Citra Aditya Bakti , Bandung.
- Undang-undang RI No.23 Th. 2004, tentang Undang-undang PKDRT